

**EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PLTU TERHADAP  
KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA KARANGGENENG  
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

Oleh :

Dewi Prabandari<sup>1)</sup> Aloysius Rengga<sup>2)</sup>

**Departemen Administrasi Publik**

**Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Dprabandarii29@gmail.com

**ABSTRACT**

PLTU Batang is a steam power plant built in Batang Regency which is expected to meet the need national electricity in Java and Bali Regions. The PLTU is located in three villages namely Ujungnegoro, Karanggeneng, and Ponowareng, near Ujungnegoro Sea. Among the three villages, Karanggeneng get the biggest impact due to the majority of its people suffered from the effect of PLTU development. The aim of this research is to evaluate the policy effects of PLTU development towards the social life of Karanggeneng Village people. This research used a descriptive qualitative method. The used data collection technique are interviews, observations, and documentation. Evaluation on the effects of PLTU Batang used the policy dimensions model by Thomas R. Dye. The results of the research indicates that the existence of PLTU Batang gives an effect to Karanggeneng Village people they were forced to sell their lands. The local people's future is also affected because the transfer of land function results in people losing their livelihoods. The PLTU policy has an effect on the current and future conditions that are increasing unemployment and poverty in Karanggeneng Village. However, the form of responsibility of PT PBI is the establishment of KUB for the affected society. It is recommended that the development of PLTU Batang should pay more attention on the people's social economic condition.

**Keywords: PLTU, Evaluation, Effects**

# **Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan PLTU terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses ke arah yang lebih baik. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa tujuan Negara “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Bertambahnya jumlah penduduk sejalan dengan bertambahnya kebutuhan akan listrik yang menyebabkan adanya krisis sumber daya listrik di Jawa Tengah yang terjadi pada tahun 2017. Krisis sumber daya listrik tersebut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan publik dengan membangun pembangkit listrik, yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Pembangunan PLTU berlokasi di Batang, karena Kabupaten Batang dipilih melalui seleksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah telah dilakukan survey di tiga kabupaten, yakni Kendal, Batang, dan Pemalang sebagai calon lokasi pembangunan PLTU. Batang menjadi lokasi yang paling cocok untuk dilakukan pembangunan PLTU karena di Batang terdapat lahan milik PTPN (PT Perkebunan Nasional) sehingga proses pembebasan lahan akan lebih mudah. Selain itu, dipilihnya Batang karena garis pantainya stabil serta kedalaman lautnya mencukupi untuk pembangunan pelabuhan sebagai sarana pemasok bahan baku batubara. Disimpulkan bahwa Desa Karanggeneng merupakan lokasi yang paling sesuai dengan perencanaan pembangunan PLTU (jateng.antaranews.com).

Pembangunan PLTU diharapkan dapat mensuplai kebutuhan listrik rumah tangga dan industri di Jawa Tengah. Tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah sisa lahan seluas 125.146 M<sup>2</sup> pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1000 MW di Kab. Batang Prov Jawa Tengah. Pembangunan PLTU, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, ataupun perluasan peluang kerja terutama masyarakat di Kabupaten Batang.

Pembanguann PLTU merupakan proyek KPS (Kerjasama Pemerintah Swaswa) berskala besar dengan nilai investasi Rp 30 Triliun. sekaligus proyek KPS pertama yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005 tentang kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Pembangunan PLTU yang sudah direncanakan mulai dibangun tahun 2012 terhambat karena adanya kendala akibat banyaknya masyarakat yang kontra. PLTU baru bisa dibangun Bulan Juni tahun 2016 dan direncanakan beroperasi mulai tahun 2020. ([market.bisnis.com](http://market.bisnis.com))

PLTU Batang membutuhkan lahan seluas 326 ha. Sebanyak 226 ha akan digunakan untuk *power block* (area proyek) dan 100 ha dipergunakan untuk pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk. Pembangunan PLTU tersebut menggunakan area lahan pertanian masyarakat di 3 (tiga) desa di desa Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng. ([kompasiana](http://kompasiana.com), 2016)

Tidak mengherankan apabila pembangunan untuk kepentingan umum ini mendapatkan kendala-kendala dari

masyarakat setempat, karena pembangunan PLTU tersebut menggunakan lahan pertanian milik masyarakat.

Sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak PT BPI (Bhimasena Power Indonesia) sebagai perusahaan konsorium yang memenangkan lelang proyek PLTU. Pembangunan PLTU Batang ini diharapkan nantinya dapat mengangkat citra Kabupaten Batang, dan sangat strategis untuk menjadi sumber pasokan listrik agar tidak terjadi pemadaman listrik secara bergilir di Jawa-Bali (wawancara masyarakat terdampak, 3 Mei 2018)

Walaupun sudah dilakukan sosialisasi oleh BPI tidak tertutup kemungkinan masyarakat tidak menolak keberadaan PLTU Batang ini. Untuk Pengambil alihan lahan oleh BPI didasarkan pada UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan menerapkan undang-undang tersebut terdapat kepastian bahwa proyek PLTU akan benar-benar terwujud dan mau tidak mau warga harus menjual tanah mereka. ([jateng.antaranews.com](http://jateng.antaranews.com))

PLTU menggunakan lahan pertanian produktif dan sawah beririgrasi teknis seluas 124,5 hektar. Perkebunan melati seluas 20 hektar dan 152 sawah

tadah hujan juga terancam. Pembangunan PLTU juga dibangun di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegero-Roban, kawasan konservasi yang seharusnya kaya ikan dan terumbu karang yang menjadi wilayah tangkapan ikan bagi nelayan dari berbagai wilayah di Pantai Utara Jawa. (Tempo.co)

Permasalahan pembebasan lahan belum berakhir. Masyarakat menginginkan ganti kerugian yang layak. Lahan tersebut dibeli oleh BPI seharga Rp. 100.000/meter, namun masyarakat menginginkan Rp. 400.000/meter. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak mau menerima uang ganti rugi. Namun, mengingat proses yang panjang dan proyek bisa segera dibangun, maka warga yang masih menolak diberi uang kompensasi. Uang kompensasi bagi masyarakat yang kontra dititipkan ke pengadilan, dan lahan masyarakat tetap diambil untuk pembangunan powerblok PLTU. (wawancara, 23 Maret 2018)

BPI memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak yaitu berupa kompensasi sosial berbentuk uang tunai dan pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama) untuk masyarakat terdampak (bisnis.liputan6.com).

BPI juga memberikan lahan pengganti bagi masyarakat terdampak,

terletak di Desa Segayung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Lahan pengganti tersebut berjarak sangat jauh dari tempat tinggal masyarakat sekitar 30 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor dari desa Karanggeneng hingga sampai ke Desa Segayung, lokasi lahan pengganti tersebut. Akibatnya, tidak semua masyarakat bisa bekerja di lahan pengganti tersebut. (wawancara 6 Mei 2018)

Dampak lingkungan pembangunan PLTU harusnya dijelaskan kepada publik karena menyangkut pertanggungjawaban terhadap risiko kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem, baik di darat maupun di laut. Warga yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi proyek berhak memperoleh informasi yang akurat seputar dampak-dampak lingkungan pembangunan PLTU dan penanggulangannya. Ini penting agar masyarakat tidak dihantui ketakutan akan bahaya PLTU yang ditimbulkan di kemudian hari. (kompasiana.com, 2011)

PLN yang harus menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen listrik di Tanah Air, juga mendorong pemilik dan pelaksana proyek PLTU dalam mengendalikan, mengelola dan mengupayakan untuk memperkecil dampak negatif proyek tersebut. Dalam

menentukan lokasi pun perlu dihindari daerah-daerah sensitif yang dapat menimbulkan dampak negatif penting, misalnya daerah yang menyimpan peninggalan sejarah, yang padat penduduk dan atau yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang layak dilestarikan. (kompasiana 2016)

Penelitian ini mengambil Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang sebagai lokasi penelitian, berdasarkan observasi dan wawancara terhadap perangkat desa Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng. Dikatakan bahwa Desa Karanggeneng merupakan Desa yang terdampak yang lebih besar dalam pembangunan PLTU tersebut. Jumlah warga yang pro kurang lebih 400 orang sekitar 345 orang yang kontra dengan perencanaan pembangunan PLTU termasuk 53 orang pemilik lahan PLTU. (M. Hijrah Saputro 2010: 6-7)

### **Tujuan Penelitian**

Mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan PLTU Batang terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Karanggeneng di Kabupaten Batang.

### **B. Teori**

#### 1. Administrasi Publik

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (Keban 2008 : 4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan – keputusan dalam kebijakan publik, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Dalam penelitian ini digunakan paradigma ke V yaitu Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara, tahun 1970. Paradigma ini telah memiliki lokus dan fokus yang jelas, yaitu fokus dari administrasi publik adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. (Miftah Thoha, 2010:18)

Lokus dari administrasi publik ini adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik (Keban, 2008:33). Paradigma tersebut sesuai dengan penelitian ini yaitu Pembangunan PLTU Batang yang berada di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman. Dibangunnya pembangkit listrik di Kabupaten Batang diharapkan dapat mensuplai kebutuhan listrik rumah tangga dan industri di Jawa Tengah serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi, ataupun perluasan peluang kerja terutama masyarakat di Kabupaten Batang.

## 2. Kebijakan Publik

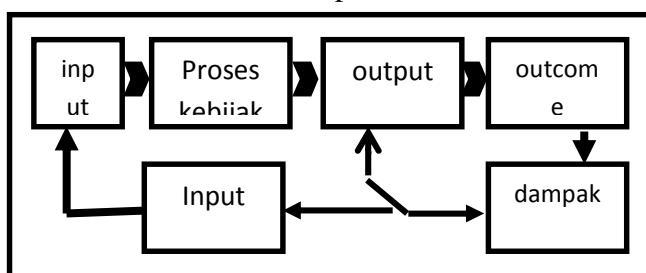
William N. Dunn (2003:132) mengatakan, Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah

Kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang telah dibuat pemerintah yang bertujuan untuk hal yang lebih baik bagi masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak lain adalah hasil dari sebuah kebijakan tersebut. salah satunya adalah Keputusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memutuskan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang.

## 3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan mengukur suatu kebijakan berhasil atau gagal berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator evaluasi kebijakan menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil (Indiahono, 2009: 145).

Gambar 1.1 Kebijakan sebagai suatu proses



Sumber: Wirawan (2011 : 109)

Proses evaluasi kebijakan bertujuan untuk melihat hasil akhir berupa dampaknya, dimana dampak yang dihasilkan tersebut menguntungkan atau merugikan. Dalam penelitian ini fungsinya adalah untuk melihat dampak yang terjadi dari evaluasi pembangunan PLTU tersebut.

## 4. Evaluasi Dampak

Dalam evaluasi dampak terdapat beberapa unit sosial terkena dampak kebijakan (Wibawa, 1994: 53-59) antara lain: Penilaian kebijakan Negara banyak dilakukan untuk mengetahui dampak-dampak kebijakan. Oleh sebab itu, ada beberapa dimensi yang digunakan dalam evaluasi kebijakan. Menurut Thomas R. Dye (1978:311-312).

1. Dampak kebijakan pada situasi target atau kelompok.
2. Kebijakan-kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan atau kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan, kebijakan-kebijakan ini dinamakan eksternalisasi atau dampak yang datang.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan sekarang dan keadaan dimasa yang akan datang.

4. Evaluasi juga menyangkur sumber lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan publik.
5. Biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan.

### C. Metode Penelitian

#### 1. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai dampak PLTU. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif semata-mata, sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

#### 2. Situs Penelitian

Dalam penelitian ini, ditentukan fokus dan lokus penelitian. Fokus kajian penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan PLTU terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Karanggeneng di Kabupaten Batang untuk memperjelas fenomena yang menunjukkan

kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi.

- b) Sedangkan lokus dari penelitian ini adalah di Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

### 3. Subjek Penelitian

Penelitian informan ialah orang yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang penelitian kualitatif ini sehingga informan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moelong, 2008: 9).

Informan dalam penelitian ini adalah:

Narasumber	Rincian	Jumlah
Pemerintah Desa	Lurah (Ds. Karanggeneng dan Ujungnegoro)	2
Pekerja PLTU	Mandor PLTU Satpam PLTU	1 1
Masyarakat	Petani Buruh Pedagang Ibu Rumah Tangga Supir Angkutan	3 8 4 2 1
Jumlah		24

### 4. Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) sumber data utama dalam penelitian

ialah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Pada bagian ini pula jenis data terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

## **5. Sumber Data**

- a. Data Primer bisa berbentuk dari sumber individu atau perseorangan dari hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan pedoman pada interview guide yang sudah disusun. Data primer diperoleh dari para responden yang meliputi pencarian data langsung pada pihak interen PLTU, pemerintah dan keompok masyarakat sekitar area pembangunan.
- b. Merupakan data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokuman, data sekunder dipergunakan untuk memberikan gambaran tambahan maupun gambaran perengkap terhadap keadaan umum objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, arsip, laporan hasil penelitian, monografi, serta bentuk-bentuk lain yang dapat memberikan informasi dalam kaitannya penelitian ini.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Telaah Dokumen / Pustaka  
Dokemen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk melengkapi pengetahuan yng mendalam tentang

suatu kasus yang berguna unntk melengkapi data memperkuat yang bisa ditarik dari penelitian ini.

### **b. Wawancara mendalam**

Teknik wawancara mendalam akan digunakan dalam penelitian ini, terutama untuk mengkonstruksi kegiatan dan kejadian disekitar kebijakan sera unntk mengklarifikasi dan memperluas data atau infoemasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan petunjuk umum wawancara yang hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isinya. Adapun yang menjadi sasaran wawancara adalah pemerintah Desa, masyarakat sekitar area pembangunan PLTU, dan pekerja PLTU.

### **c. Pengamatan langsung atau observasi**

Teknik pengamatan langsung digunakan untuk mepdalam pemahaman tentang peran masing-masing sehubungan dengan pembangunan PLTU tersebut.

### **d. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yairu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

### **e. Kualiatas Data**



Kualitas data dicek dengan menggunakan triangulasi dan kecukupan referensi

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dampak kebijakan pada situasi target atau kelompok**

PLTU sekarang ini masih dalam proses pembangunan, tetapi dalam proses pembangunan tersebut masih terdapat permasalahan yang tak kunjung terselesaikan oleh PT BPI, yaitu penyelesaian permasalahan alih fungsi lahan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

PT BPI pun melakukan dengan cara *door to door* kepada masyarakat pemilik lahan dalam menentukan harga untuk alih fungsi lahan. Harga yang ditawarkan oleh PT BPI kepada masyarakat pemilik lahan adalah Rp 35.000, Rp 60.000 dan penawaran terakhir hingga Rp 100.000 per meter.

Pembebasan lahan belum terselesaikan karena adanya isu yang mengatakan bahwa ada masyarakat yang menjual lahan dengan harga Rp 400.000 per meter. Masyarakat merasakan adanya ketidakadilan, sehingga mereka menginginkan pembayaran yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan.

Masyarakat buruh yang terkena dampak PLTU diberikan lahan pengganti, sebagian masyarakat buruh yang tidak

mendapatkan lahan pengganti mendapatkan kompensasi uang yang berbeda-beda Rp 250.000, Rp 300.000 ada yang Rp 400.000 ada juga yang Rp 300.000. Uang kompensasi yang kurang lebih 350.000 tersebut diberikan perbulan dalam waktu 16-18 bulan dari awal penempatan proyek.

### **B. Kebijakan-kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan atau kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan**

PLTU dibangun untuk memenuhi pasokan kebutuhan listrik di Jawa-Bali. Kebijakan pemerintah untuk *power block* lahan PLTU membuat masyarakat kehilangan lahan dan mata pencaharian.

Mayoritas masyarakat wanita yang dulu bekerja sebagai buruh memetik bunga melati, sekarang menjadi pengangguran. Sangat disayangkan dengan adanya PLTU tersebut kebiasaan-kebiasaan yang dulu mereka lakukan pagi berangkat kerja sekarang kebanyakan dari mereka menjadi masyarakat pengangguran, terutama untuk kaum wanita dan masyarakat yang berumur.

Namun ada sebagian masyarakat yang mendapat manfaat positif pembangunan proyek PLTU dengan membuka usaha baru berupa warung makan dan membuka kos-kosan di sekitar proyek PLTU.

### **C. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan sekarang dan keadaan dimasa yang akan datang**

Dampak yg disebabkan oleh pembangunan PLTU tersebut banyak merugikan masyarakat salah satunya adalah bertambahnya tingkat pengangguran di Kabupaten Batang dan pengaruhnya terhadap pendapatan daerah.

BPI memberikan kesempatan untuk mereka yang ingin ikut bergabung dalam pembangunan proyek tersebut, namun mereka harus memiliki keahlian atau skill agar bisa ditarik untuk bekerja. Tetapi di masyarakat Desa Karanggeneng mayoritas tidak memiliki skill untuk bekerja di proyek tersebut.

### **D. Biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan public**

Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT BPI yang disebut CSR (Corporate Social Responsibility) adalah bentuk kegiatan di sekitar perusahaan yang berdampak baik bagi masyarakat, lingkungan, dan perusahaan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

BPI membentuk program dengan nama KUB (Kelompok Usaha Bersama), karena masyarakat yang kurang pendidikan mengenai kewirausahaan perlu diberikan pendalaman program.

Bentuk dukungan BPI terhadap KUB tersebut antara lain berupa pendampingan kelompok, administrasi, sarana produksi, permodalan, dan menghadirkan jaringan pemasaran (offtaker).

Namun program tersebut tidak berjalan lagi hanya bisa bertahan 1-2 tahun.

### **E. Biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan**

Lahan merupakan hal yang sangat sensitife untuk dibicarakan. Adapun masyarakat yang menjual lahannya ke BPI karena keterpaksaan untuk menjual lahan. Lahan yang masih dalam permasalahan pembebasan lahan masih belum terpecahkan padahal lahan tersebut sudah dalam area *power block* dan uang jual beli masih dititipkan di pengadilan.

Pembangunan PLTU diharapkan PLTU dapat mensejahterakan masyarakat, tetapi ternyata masyarakat banyak yang menderita akibat alih fungsi lahan yang dilakukan oleh PT BPI. Masyarakat yang sudah merasa dirugikan PLTU tidak ingin dirugikan lagi dengan adanya biaya pengeluaran atau apapun untuk PLTU ataupun untuk PT BPI sendiri. Pendapatan mereka kini jauh berbeda dari sebelumnya dan masyarakat masih sangat mengharapkan jika BPI dapat memberikan

kesejahteraan untuk kehidupan masyarakat di masa yang akan datang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Dampak kebijakan pada situasi target atau kelompok**

PLTU Batang dibangun di lahan pertanian yang produktif dimana lahan tersebut adalah sumber mata pencaharian masyarakat satu-satunya.

#### **2. Kebijakan-kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan atau kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan**

Pembangunan PLTU memberikan dampak yang tidak kecil terhadap masyarakat yang tidak kecil. Masyarakat banyak yang kemudian menganggur, terutama bagi masyarakat perempuan dan masyarakat yang sudah berumur.

Pembangunan PLTU membuka peluang kerja untuk masyarakat dalam bentuk usaha kulier, dan kos-kosan untuk masyarakat perantauan yang bekerja di PLTU.

#### **3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan sekarang dan keadaan yang akan datang**

Pembangunan PLTU membuat bertambahnya angka pengangguran di Desa Karanggeneng. Dimana BPI membuka peluang kerja bagi masyarakat produktif untuk mereka yang ingin ikut

bergabung dalam pembangunan proyek PLTU.

#### **4. Evaluasi juga menyangkut sumber lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan publik**

Bentuk dukungan bantuan dari BPI berbentuk KUB. BPI memberikan pendampingan kelompok, administrasi, sarana produksi, permodalan, dan menghadirkan jaringan pemasaran kepada masyarakat terdampak.

Namun program tersebut tidak berjalan lagi hanya bisa bertahan 1-2 tahun.

#### **5. Biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan**

Masyarakat tidak ingin dirugikan dengan adanya proyek PLTU. Pembangunan proyek PLTU masih dalam rekontruksi tetapi masyarakat (pemilik lahan) tidak ingin mengambil kompensasi dari BPI dimana kompensasi tersebut masih dititipkan di pengadilan negeri.

### **B. Saran**

1. Sebagian masyarakat kehilangan lahan dengan pembangunan PLTU seharusnya pemerintah mencermati dengan benar permasalahan yang ada

- di masyarakat karena itu menyangkut masa depan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, karena tingkat pengangguran bertambah.
2. Lahan power blok PLTU merupakan lahan matapencaharian satu-satunya untuk masyarakat seharusnya pemerintah cepat bertindak untuk memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk masyarakat terdampak yang sifatnya terus menerus sampai usaha tersebut bisa berdiri. Lapangan pekerjaan baru sangat penting untuk masyarakat.
  3. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak bagi masyarakat yang terkena proyek baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya penduduk asli Kabupaten Batang, yang mana masih banyak masyarakat yang terkena dampak yang berpendidikan rendah atau tidak memiliki skill tertentu tidak dapat menjadi tenaga kerja PLTU akhirnya mereka menjadi pengangguran. Masyarakat hendak mau membuka diri dengan keberadaan PLTU. Pendirian PLTU tidak hanya ditujukan masyarakat Batang melainkan masyarakat secara nasional. Hal ini untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia
  4. PT BPI seharusnya sendiri yang perlu meneliti permasalahan apa di masyarakat yang membuat KUB tidak berjalan lagi. Karena masyarakat mayoritas berpendidikan rendah tidak tahu tentang dunia kewirausahaan. Pentingnya pemerintah untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat agar wirausaha yang dirintis dapat berjalan lancar hingga menjadi usaha yang dikenal public. Ganti rugi yang diterima masyarakat seharusnya digunakan sebaik mungkin sehingga dapat mengangkat pendapatan dan taraf hidupnya. Dan bahkan uang kompensasi dan KUB dikelola dengan baik yang nantinya dapat bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya.
  5. Perlu adanya kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat tentang biaya lahan yang masih di pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dunn, William N. (1999). *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press (2000). Yogyakarta.

Dye, Thomas R. (1989). *Understanding Public Policy*. United States of America

Keban, Yeremias T. 2008. *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gaya Media.

Moeleong, Lexxy J, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Subarsono , AG 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wibawa, Samudra dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah

Internet:

<https://jateng.antaranews.com/detail/pltu-batang-janji-kembangkan-usaha-mikro.html>

<https://bisnis.tempo.co/read/620207/lahan-pltu-batang-diselesaikan-dengan-konsinyasi>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/03/03/173100726/Ganti.Rugi.Lahan.PLTU.Batang.Lima.Kali.NJOP>

Dokumen-Dokumen:

UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepentingan Bangsa Negara dan Masyarakat yang Harus Diwujudkan oleh Pemerintah